

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bos: Mengidentifikasi Penyebab Penyelewengan

Umdatul Mursiyah^{1*}, Siti Apipah Zachroh¹, Aprilliantoni¹

¹Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia

Corresponding Author: ✉ ilumdatul.mursiyah.sps@unismabekasi.ac.id*

ABSTRACT

This study attempts to analyze the factors underlying the misappropriation or abuse of BOS funds in the school environment and to formulate strategic steps that can be taken to prevent such misappropriation. Thus, the management of BOS funds can be carried out transparently and accountably. This study uses a literature review method with library research data collection techniques. Data were collected from various journals, articles, and official documents related to BOS fund management, transparency, and accountability. The analysis was conducted to identify patterns of misappropriation of funds and good fund management methods. The results of this study indicate that there are several underlying factors causing the misappropriation of BOS funds, including: Lack of supervision and transparency, lack of understanding of the regulations on the use of funds, and a deep-rooted culture of corruption. The conclusion of this study is that in order to increase transparency and accountability in the management of BOS funds, it is necessary to improve the capabilities of human resources (HR) through training on regulations and the use of information technology. It is hoped that this recommendation will help the government and related parties in creating a better BOS fund management system because community participation must be increased so that they can play an active role in supervising the use of BOS funds

Keywords: *Transparency, Accountability, Management of Boss Funds, Missappropriation*

ARTICLE INFO

Article history:

Received
August 01, 2024

Revised
November 05,
2024

Accepted
November 26,
2024

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah perihal yang sangat penting, sebab orang yang berpendidikan akan memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah dan tantangan global dalam kehidupannya. Dikarenakan mahalanya biaya Pendidikan, masyarakat yang kurang mampu berfikir ulang untuk menyekolahkan anak-anak mereka, sehingga pemerintah menyediakan dana untuk mewujudkan standar pendidikan nasional. Di era globlasasi sekarang ini, pendidikan dianggap mahal bagi sebagian masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah atau kalangan kurang mampu. Hal ini disebabkan karena biaya pendidikan yang tinggi, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan di masyarakat kurang mampu. Jika pemerintah ingin menciptakan standar pendidikan nasional, maka hendaknya pemerintah wajib menyediakan dana pendidikan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pendanaan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah mengembangkan program ini untuk mendukung biaya operasional non-personalia di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dasar adalah lembaga formal yang memberikan pendidikan umum pada tingkat dasar. Dengan dana BOS, lembaga pendidikan diharapkan dapat mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara baik, serta mempertanggungjawabkan semua biaya pendidikan kepada masyarakat dan pemerintah dengan cara yang transparan (Oga, 2021 dalam Ucik Rachmawati, 2023).

Meskipun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersedia untuk mengatasi masalah pendidikan, berbagai isu lain tetap muncul. Isu-isu tersebut meliputi ketidaksesuaian antara penyediaan dana dan kebutuhan lembaga, kurangnya partisipasi orang tua dalam perencanaan, serta ketidakefektifan penggunaan dan pengelolaan dana BOS. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam pelaporan dan penggunaan aplikasi program dana BOS yang sering berubah. Dalam pelaksanaan dan pengelolaannya, dana BOS di sekolah sering kali menghadapi masalah dalam penganggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban. Sekolah juga sering kali gagal menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam administrasinya. Oleh karena itu, baik pengelolaan dana dari pemerintah maupun masyarakat harus tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi saat menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah langkah awal penting dalam pengelolaan keuangan sekolah. RKAS dilaksanakan melalui evaluasi akuntansi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dana BOS dari pemerintah pusat dan daerah dikelola oleh struktur RKAS. Kepala sekolah bertugas membentuk tim pengelola dana BOS, yang kemudian menyusun RKAS dengan melakukan analisis kebutuhan sekolah, melibatkan guru dan komite sekolah dalam perencanaan program dana BOS yang relevan (Yanti, 2021 dalam Ucik Rachmawati, 2023). Salah satu tujuan penyusunan RKAS adalah untuk membuat rencana penyelenggaraan sekolah yang efektif dan efisien sehingga anggaran yang disusun dapat mencapai target sekolah. RKAS mencakup berbagai faktor, seperti sumber pendanaan, rincian kegiatan, total biaya per unit, serta total biaya kurikulum sekolah. Dengan adanya RKAS, bukan hanya tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga untuk memastikan adanya pengendalian dan pengawasan yang baik terhadap penggunaan dana BOS dan sumber daya yang tersedia.

Menurut Minarti (Ekowati, 2016 dalam Ucik Rachmawati, 2023), transparansi dalam pengelolaan dana lembaga pendidikan merujuk pada keterbukaan mengenai sumber keuangan, serta rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya, yang harus disampaikan dengan jelas agar mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Lailia (2018), ada beberapa indeks yang menunjukkan pentingnya transparansi, yaitu: 1) tidak adanya rancangan hukum untuk keterbukaan, 2) anggaran yang transparan dan dapat diakses publik, dan 3) adanya audit yang independen dan efektif. Oleh karena itu, transparansi dianggap sebagai prinsip yang mengatur ketersediaan informasi bagi semua orang tentang tata kelola, termasuk kebijakan, proses pembuatan dan penerapan, serta pencapaian hasil akhir.

Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab. Dalam konteks ini, sekolah harus dapat diakuntabel, yang berarti bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, terutama dalam pengelolaan dana sekolah. Penerapan akuntabilitas yang baik di sekolah sangat penting, karena hal ini

menunjukkan bahwa sekolah sebagai penyelenggara pendidikan telah menjalankan tugasnya dengan benar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (Heliani dkk, 2022 dalam Ucik Rachmawati, 2023). Selain itu, E. Mulyasa dalam (Shaftratunnisa, 2015 dalam Ucik Rachmawati, 2023) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah “Tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan sekolah dilaksanakan melalui manajemen berbasis sekolah, yang mengharuskan penyampaian laporan pertanggungjawaban di akhir tahun anggaran setelah dana dikeluarkan selama satu tahun”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam pengelolaan dana lembaga pendidikan. Transparansi memastikan keterbukaan informasi mengenai sumber keuangan dan penggunaan dana, yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Sementara itu, akuntabilitas menekankan tanggung jawab sekolah dalam pengelolaan keuangan, yang perlu diterapkan dengan baik untuk membuktikan bahwa sekolah telah melaksanakan tugasnya secara benar. Kedua aspek ini saling mendukung dan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Dalam penelitian lain juga ditemukan bahwa transparansi terlihat dari keterlibatan berbagai aspek di sekolah, seperti komite sekolah, staf, guru, kepala sekolah, dan bendahara, dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Selain itu, akuntabilitas yang ditunjukkan oleh sekolah ditegaskan melalui laporan penggunaan dana BOS yang direkapitulasi dan terus dipantau oleh Dinas Pendidikan.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan (Adlini et al., 2022). Proses pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis berbagai literatur terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kemudian data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti laporan penelitian, artikel berita, dan publikasi akademik untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai penyelewengan dana BOS.

Proses dalam mencari referensi literatur untuk menulis artikel ini adalah dengan mencari jurnal resmi dari Google Scholar, Portal Garuda, Research Gate, Science Direct, dll. Pencarian pustaka berfokus pada kata kunci yang relevan dan sering muncul seperti media sosial Transparansi, Akuntabilitas, Dana bos. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang mendalam mengenai isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penyelewengan dana BOS yang Dilakukan oleh staf Pendidikan di Lingkungan Sekolah.

Lingkungan sekolah adalah wadah bagi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam menjalankan sistem pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu, termasuk kekuatan spiritual keagamaan, akhlak yang baik, kepribadian positif, kemampuan pengendalian diri, kecerdasan, dan kemampuan yang bermanfaat bagi individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekolah adalah sebuah sistem layanan masyarakat yang rentan terhadap korupsi, karena dalam sektor ini, tindakan korupsi melibatkan banyak pihak dan memiliki anggaran yang

besar. Sekolah adalah sebuah sistem layanan publik yang sangat rentan terhadap penyelewengan dana.

Hal ini disebabkan oleh keterlibatan banyak pihak dalam penyelewengan dana di sektor ini, serta tingginya kebutuhan akan modal dan anggaran (Sriniti, Debyra Restu Mauludi, 2023). Tindakan penyalahgunaan dana BOS di sekolah biasanya dilakukan oleh tenaga pendidik yang bertanggung jawab dalam administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis dalam pendidikan. Beberapa tenaga kependidikan yang berpotensi terlibat dalam korupsi dana BOS meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, staf Tata Usaha, dan Guru. Penyelewengan dana BOS dapat terjadi dengan berbagai cara, dan yang paling umum adalah penggunaan dana BOS untuk tujuan yang tidak sesuai serta manipulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sumber pendanaan penting yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung operasional sekolah. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh staf pendidikan. Penyelewengan ini tidak hanya merugikan sekolah, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan program BOS. Berikut adalah beberapa bentuk penyelewengan dana BOS yang umum terjadi:

1. Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Penyimpangan ini terjadi ketika staf pendidikan, termasuk kepala sekolah, mengadakan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah (Sari & Prabowo, 2020). Beberapa praktek yang sering dilakukan adalah:

- Penggelembungan Harga: Membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar.
- Pengadaan Fiktif: Mencatat pengadaan barang yang tidak pernah dilakukan, sering kali disertai dengan dokumen palsu untuk menunjukkan bahwa barang tersebut telah diterima.

2. Pemalsuan Laporan Keuangan

Pemalsuan laporan keuangan adalah bentuk penyelewengan di mana staf pendidikan membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan (Haryono, 2021). Contohnya:

- Laporan Pengeluaran Fiktif: Mengklaim pengeluaran untuk kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan.
- Tanda Tangan Palsu: Menggunakan tanda tangan palsu dari guru atau staf untuk menyetujui pengeluaran yang tidak sah.

3. Penyelewengan Dana untuk Keuntungan Pribadi

Beberapa oknum staf pendidikan menggunakan dana BOS untuk keuntungan pribadi (Fitria & Andriani, 2019). Misalnya:

- Alokasi Dana untuk Kepentingan Pribadi: Menggunakan dana untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti membeli barang.
- Transfer Dana ke Rekening Pribadi: Menggunakan dana BOS ke rekening pribadi untuk kebutuhan pribadi atau kelompok tertentu.

4. Pungutan Liar

Pungutan liar adalah praktik yang terjadi ketika sekolah meminta uang tambahan dari orang tua siswa dengan alasan berbagai alasan (Kusuma, A. W., & Lestari, 2022). Misalnya:

- Biaya Administrasi: Mengajukan permintaan uang untuk biaya yang seharusnya sudah tercakup dalam dana BOS.

- Kegiatan Sekolah: Mengatakan bahwa dana BOS tidak cukup untuk mendanai kegiatan tertentu, sehingga orang tua diminta memberikan sumbangan tambahan.

5. Manipulasi Jumlah Siswa

Beberapa sekolah melakukan manipulasi jumlah siswa terdaftar untuk mendapatkan alokasi dana BOS yang lebih besar (Rizal, M. 2023). Bentuk manipulasi ini antara lain:

- Pelaporan Jumlah Siswa yang Digelembungkan: Memberikan laporan jumlah siswa yang lebih banyak daripada yang sebenarnya terdaftar.
- Pendaftaran Siswa Fiktif: Melaporkan jumlah siswa yang tidak ada untuk mendapatkan dana lebih dari pemerintah.

6. Mengabaikan Peran Komite Sekolah

Kepala sekolah kadang-kadang mengabaikan peran Komite Sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini dapat mengakibatkan:

- Keputusan Sepihak: Pengambilan keputusan yang tidak melibatkan stakeholder lain, sehingga mengurangi akuntabilitas.

Kurangnya Pengawasan: Tanpa keterlibatan Komite Sekolah, pengawasan terhadap penggunaan dana menjadi lemah

Penyelewengan dana BOS oleh staf pendidikan di sekolah perlu ditangani dengan serius. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat membuat penggunaan dana BOS lebih efektif dan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan, pelanggaran harus ditegakkan dengan tegas.

B. Sebab-Sebab Tenaga Kependidikan Melakukan Penyelewengan dana BOS di Lingkungan Sekolah.

Penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia menjadi masalah serius yang mengancam integritas pendidikan. Dana BOS seharusnya digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional non-personalia sekolah, tetapi dalam realitanya, banyak oknum di dunia pendidikan yang melakukan penyelewengan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dana BOS:

1. Kurangnya Pengawasan dan Transparansi.

Salah satu penyebab utama terjadinya penyalahgunaan dana adalah minimnya pengawasan dari pihak-pihak terkait, seperti komite sekolah dan masyarakat. Banyak kepala sekolah dan bendahara yang mengelola dana BOS dengan cara yang tidak transparan, sehingga tidak ada yang mengawasi penggunaan dana tersebut. Kondisi ini membuka kesempatan bagi oknum untuk menyalahgunakan anggaran tanpa khawatir terungkap (Supriyadi, E., 2021 dalam Debyra Restu Mauludi, 2023).

2. Modus Operandi (cara beroperasi) yang Beragam.

Penyelewengan dana BOS sering kali dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

- Kepala sekolah dapat melakukan pemalsuan dokumen, seperti membuat laporan penggunaan dana yang tidak akurat, termasuk memalsukan tanda tangan guru untuk honor yang sebenarnya tidak dibayarkan (Diah, R.,2022).
- Praktik pengadaan barang dan jasa yang tidak nyata, di mana dana BOS dialokasikan untuk pembelian yang tidak pernah terjadi, memungkinkan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi (Hidayah, L., 2021).

- Laporan jumlah siswa yang tidak sesuai untuk mendapatkan alokasi dana yang lebih besar dari seharusnya (Setiawan, J., 2020).
- 3. Motivasi Pribadi dan Ketidakpuasan
Kebutuhan finansial yang mendesak sering kali memotivasi tenaga kependidikan untuk melakukan penyalahgunaan dana. Dalam beberapa situasi, kepala sekolah memanfaatkan dana BOS untuk kepentingan pribadi atau mengalihkan dana tersebut ke rekening pribadi mereka (Prabowo, M., 2023). Ketidakpuasan dengan gaji atau kondisi kerja juga dapat mengakibatkan tindakan penyelewengan sebagai bentuk pembalasan (Siwalima, 2021).
- 4. Rendahnya Pengetahuan dan Keterampilan Pengelolaan Anggaran.
Banyak tenaga pendidik yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pengelolaan dana BOS. Minimnya pelatihan dan pemahaman tentang prosedur penggunaan dana dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyalahgunaan (Iskandar, A., 2022).
- 5. Budaya Korupsi yang Mengakar.
Budaya korupsi yang telah mengakar di lingkungan pendidikan turut berperan dalam terjadinya penyalahgunaan dana BOS. Apabila praktik korupsi dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak diikuti dengan sanksi yang tegas, tenaga kependidikan akan merasa lebih bebas untuk melakukan penyimpangan (Santosa, R., 2023 dalam Debyra Restu Mauludi, 2023).

Penyalahgunaan dana BOS di sekolah adalah masalah yang kompleks, melibatkan berbagai faktor seperti minimnya pengawasan dan budaya korupsi yang telah mengakar. Untuk mengatasi isu ini, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.

Penyelewengan dana BOS di sekolah dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi dunia pendidikan. S.H. Alatas mengidentifikasi beberapa konsekuensi yang akan muncul akibat terjadinya korupsi, di antaranya:

1. Menimbulkan Ketidakadilan
Penyalahgunaan terhadap dana BOS yang dilakukan oleh staf pendidikan di lingkungan sekolah mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat, terutama bagi para siswa. Dana BOS seharusnya digunakan untuk mendukung operasional sekolah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, bukan untuk kepentingan pribadi. Program dana BOS diperkenalkan oleh pemerintah agar siswa-siswi dapat menikmati hak mereka untuk belajar dalam lingkungan yang nyaman, dengan memenuhi semua kebutuhan sekolah, mulai dari buku hingga komputer yang mendukung kegiatan belajar (Sudarsono, A., & Rahardjo, B., 2020).
2. Terjadi Demoralisasi Generasi Bangsa
Penurunan kualitas moral bangsa dapat disebabkan oleh lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat kedua bagi anak-anak sebagai generasi penerus untuk menerima pendidikan akhlak dan moral yang baik. Lingkungan ini harusnya mendukung pembentukan karakter yang disiplin, jujur, dan bijaksana. Namun, dengan maraknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh tenaga kependidikan di sekolah, hal ini dapat menjadi contoh yang negatif bagi generasi mendatang (Santosa, R., 2021).
3. Negara akan mengalami kerugian

Tindakan korupsi terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara, mengingat pemerintah telah mengalokasikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Kasus korupsi yang melibatkan tenaga kependidikan menyebabkan tujuan program dana BOS tidak tercapai, karena alokasi dana untuk pendidikan menjadi tidak efisien. Akibatnya, pelayanan pendidikan pun menjadi kurang memadai (Hasan, M., & Utami, T., 2021)

4. Normalisasi tindak pidana korupsi

Normalisasi tindakan korupsi di masyarakat dapat terjadi karena lingkungan sekolah sering kali menjadi tempat munculnya perilaku yang dapat menjadi bibit korupsi. Contohnya, praktik suap oleh orang tua siswa agar anak mereka diterima di sekolah tertentu, gratifikasi berupa hadiah kepada guru tertentu, serta pungutan liar untuk melengkapi buku di perpustakaan sekolah. Jika perilaku-perilaku ini dianggap biasa dan dilanjutkan dari generasi ke generasi, hal ini dapat menciptakan legitimasi bagi tindakan korupsi yang lebih besar, termasuk korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Prasetyo, E., & Dwi, R., 2021 dalam Debyra Restu Mauludi, 2023).

C. Upaya Penanggulangan Penyelewengan Dana BOS oleh Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah

Dalam penyelewengan dana BOS, tenaga kependidikan berperan sebagai pelaku, sementara masyarakat dan negara menjadi korban, menunjukkan bahwa mereka terlibat secara aktif dalam terjadinya tindak penyelewengan tersebut. Kurangnya pengawasan serta perhatian dari masyarakat dan negara dapat menciptakan perilaku jahat pada pelaku, baik secara sengaja maupun tidak, tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing. Terdapat hubungan fungsional antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, meskipun penyelewengan dana BOS di lingkungan sekolah tidak dapat dihilangkan secara instan, upaya dapat dilakukan untuk meminimalkan kejahatan tersebut (Sutrisno, R., 2021 dalam Debyra Restu Mauludi, 2023)

Berbagai langkah dapat diambil untuk mengatasi penyelewengan dana BOS diantaranya adalah:

1. Penguatan sistem pengawasan yang ketat dan berkelanjutan sangat penting untuk mencegah penyelewengan dana.
 - Auditing berkala: Melaksanakan audit rutin terhadap penggunaan dana BOS untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Audit ini perlu dilakukan oleh auditor independen yang memiliki reputasi baik untuk memberikan penilaian yang objektif. Dengan adanya audit secara berkala, diharapkan penyimpangan dapat terdeteksi lebih awal, sehingga tindakan pencegahan bisa dilakukan sebelum masalah memburuk (Kurniawan, A., 2020 dalam Debyra Restu Mauludi, 2023).
 - Pelaporan transparan: Mendorong sekolah untuk menyampaikan laporan penggunaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pihak berwenang. Sekolah perlu menyusun laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami, serta mempublikasikannya melalui media yang dapat diakses oleh publik. Transparansi ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab di kalangan tenaga kependidikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan (Sutrisno, R., 2021 dalam Debyra Restu Mauludi, 2023).

2. Pendidikan dan pelatihan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tenaga kependidikan tentang pentingnya pengelolaan dana yang baik.
 - Pelatihan Etika dan Manajemen Keuangan: Memberikan pelatihan yang berfokus pada etika dalam pengelolaan dana serta manajemen keuangan yang efektif. Pelatihan ini akan membantu tenaga kependidikan memahami tanggung jawab mereka dalam menggunakan dana BOS dan memberikan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dana secara efisien (Wahyuni, S., 2019 dalam Debyra Restu Mauludi, 2023).
3. Pemberdayaan masyarakat melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan dana BOS.
 - Forum Komunikasi: Mendirikan forum komunikasi antara sekolah dan orang tua siswa untuk mendiskusikan penggunaan dana BOS. Forum ini dapat berfungsi sebagai tempat untuk mendengarkan keluhan dan saran dari orang tua, serta meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana (Sutrisno, R. (2021 dalam Debyra Restu Mauludi, 2023).

Penyelewengan dana BOS oleh tenaga kependidikan adalah masalah yang rumit, namun dapat diatasi dengan langkah-langkah yang tepat. Penguatan sistem pengawasan melalui audit berkala dan pelaporan transparan merupakan langkah awal yang sangat penting. Selain itu, pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kependidikan, serta pemberdayaan masyarakat juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari penyelewengan/penyalahgunaan dana. Dengan upaya kolaboratif ini, diharapkan dana BOS dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

KESIMPULAN

Penyelewengan dana BOS dapat diatasi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Ketidakjelasan dalam transparansi membuka peluang untuk penyelewengan dana dan penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan akuntabilitas yang rendah membuat pengawasan penggunaan dana menjadi kurang efektif. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perubahan dan pembaharuan dalam sistem pengelolaan dana BOS, termasuk penerapan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, pelatihan untuk pengelola dana, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dana BOS dapat digunakan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

REFERENSI

- Diah, R. (2022). Analisis Penyalahgunaan Dana BOS dalam Pengelolaan Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Etika*, V8(1), 89-101.
- Fitriani, S. (2022). Dampak Kebutuhan Ekonomi Terhadap Integritas Pengelolaan Dana Pendidikan. *Jurnal Etika dan Pendidikan*, V7(2), 77-88.
- Haryanto, B. (2020). Pengaruh Pengetahuan dan Pelatihan terhadap Pengelolaan Dana di Sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, V5(2), 75-84.
- Hidayah, L. (2021). Pemalsuan Dokumen dan Penyalahgunaan Dana di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, V6(2), 34-50.
- Iskandar, A. (2022). Pentingnya Pelatihan dalam Pengelolaan Dana BOS bagi Tenaga Pendidik. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen*, V10(1), 50-65.
- Kurniawan, A. (2020). Peran Pengawasan dalam Pencegahan Korupsi di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Internasional Integritas Pendidikan*, V16(1), 30-45.

- Lestari, D. (2021). Korupsi dalam Pendidikan: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pendidikan*, V9(2), 88-100
- Nuraini, T. (2021). Analisis Penyalahgunaan Dana BOS oleh Kepala Sekolah: Studi Kasus di Beberapa Sekolah. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, V9(4), 23-35.
- Prabowo, M. (2023). Faktor-Faktor yang Mendorong Penyalahgunaan Dana BOS di Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, V11(3), 45-60.
- Pramudya, H. (2020). Penyalahgunaan Anggaran di Sektor Pendidikan: Peran Budaya dan Etika. *Jurnal Etika dan Pendidikan*, V6(3), 123-135.
- Santosa, R. (2023). Dampak Budaya Korupsi terhadap Pengelolaan Dana Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, V12(1), 31-45.
- Setiawan, J. (2020). Manipulasi Data dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Keuangan Pendidikan*, V3(4), 112-125.
- Sutrisno, R. (2021). Memahami Peluang Kejahatan: Studi Korupsi dalam Pendidikan. *Jurnal Hukum Pidana*, V40(2), 175-189.
- Wahyuni, S. (2019). Korupsi sebagai Fenomena Sosial: Analisis Hubungan Fungsional Korban dan Pelaku. *Jurnal Isu Sosial*, V55(3), 403-418.
- Yulianti, R. (2021). Kendala dalam Pengelolaan Dana BOS di Sekolah: Tinjauan dari Aspek Sumber Daya Manusia. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, V8(3), 99-110.

Copyright Holder :

© Umdatul Mursiyah1et al., (2024).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

